

ABSTRAK

ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Anggiat Makbul Tarihoran *

Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **

Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum ***

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah menjadi suatu kebutuhan yang pokok pada kehidupan manusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa penguasaan lahan HGU oleh masyarakat secara mediasi menurut ketentuan hukum di Indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa penguasaan HGU oleh masyarakat melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, bagaimana hambatan dalam penyelesaian sengketa penguasaan HGU oleh masyarakat melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara . Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Pengaturan hukum penyelesaian tanah HGU secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dilakukan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis..

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya mengatasi hambatan adalah mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali.

Kata Kunci: Sengketa, Pertanahan, Mediasi,

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

**ANALYSIS OF COMMUNITY RESOLUTION OF LAND CONTROL
DISPUTES WITH USE RIGHTS THROUGH MEDIATION AT
THE KUTAI KARTANEGARA DISTRICT LAND OFFICE**

Anggiat Makbul Tarihoran *

Dr. Danialsyah, S.H.,M.H **

Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum ***

Land has a very important meaning in human life, because land is a basic need in human life. The problems in this thesis are how to regulate legal arrangements for resolving HGU land tenure disputes by the community through mediation according to legal provisions in Indonesia, how to resolve HGU tenure disputes by the community through mediation by the Kutai Kartanegara Regency Land Office, what are the obstacles in resolving HGU tenure disputes by the community through mediation by the Kutai Kartanegara Regency Land Office

The research carried out is normative research and is supported by empirical juridical data, namely conducting interviews with the Head of the Public Information Services Subdivision of the Kutai Kartanegara Regency Land Office. The data analysis used is qualitative data.

The legal arrangements for settling HGU land through mediation at the Kutai Kartanegara Regency Land Land Office are guided by Decree of the Head of BPN RI No. 34 of 2007 concerning Mediation Implementation Mechanisms which provides direction on steps for handling and resolving land issues. The procedure for resolving land disputes through mediation at the Kutai Kartanegara Regency Land Office is to call the parties separately to find out the wishes of each party. After summoning the parties, they separately check the data, both physical data and juridical data.

Based on the discussion, it was concluded that the obstacle in the mediation process at the Kutai Kartanegara Regency Land and Land Office was the absence of the disputing parties, the lack of good faith from each disputing party. An effort to overcome obstacles is to attempt the mediation process more than once.

Keywords: Dispute, Land, Mediation

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

KATA PENGANTAR